

Referensi Terpercaya Sektor Komunikasi & Informatika

KOMINFO next



Tata Kelola PSE: Mengawal Kedaulatan Digital

Edisi 43
Juli 2022



9 772655 993006

TIM REDAKSI

Pengarah:
Mira Tayyiba

Wakil Pengarah:
JH Phillip Gobang

Pemimpin Redaksi:
Rhina Anita

Wakil Pemimpin Redaksi:
Daoni Diani Hutabarat

Redaktur Pelaksana:
Helmi Fajar Andrianto

**Wakil Redaktur
Pelaksana:**
Viskayanesya

Redaktur:
M. Taufiq Hidayat
Verawati
Annisa Bonita P.

Reporter:
Yusuf
Ahmad Irso Kubangun
Meita Pusparini
Desideramus Bitan
Emild Kadju

Fotografer:
Agus Yudi Harsono
Doni Paulus Sumule
Sri Indrati Novinarsari
Indra Kusuma

Desain & Layout:
Adista Winda Rizka
Rahma Aulia Indroputri
Lamdza Rachmattunisa
Dhenty Febrina Sahara
Annas Yudistira Saputra

Produksi:
Fahmie Trihatin J.

Alamat Redaksi:
Biro Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika
Jl. Medan Merdeka Barat
No. 9, Jakarta Pusat

Kedaulatan Digital Lewat Kewajiban Pendaftaran PSE

Salam Transformasi Digital, para Pembaca Majalah Kominfo Next. Indonesia kini memasuki fase ketiga kedaulatan nasional, yakni kedaulatan digital. Fase pertama pada saat *the founding father* kita membuka lembaran sejarah bangsa ini untuk meraih kemerdekaan. Fase kemerdekaan adalah awal dari Indonesia yang berdaulat setelah melawan koloni dan protektorat asing, sehingga kedaulatan secara politik terus berkobar sampai di usia 77 tahun kemerdekaan.

Fase kedua adalah perjuangan maritim. Sebagaimana dalam catatan sejarah bahwa melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia berhasil membangun dan mempertahankan kawasan kedaulatan laut. Lantas mengapa saat ini digitalisasi menjadi fase kedaulatan ketiga?

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate dalam berbagai forum selalu menekankan tiga fase kedaulatan nasional tersebut. Untuk fase kedaulatan digital, hal ini selaras dan sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar tidak ada lagi kesenjangan digital antar wilayah dan antar masyarakat di seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, melalui akselerasi transformasi digital nasional, Kementerian Kominfo telah menyusun *roadmap* atau Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024.



Rhina Anita

• Kepala Biro Hubungan Masyarakat
• **Pemimpin Redaksi Majalah Kominfo Next**


Salah satu poin penting dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 adalah pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Ketika Indonesia tidak ada lagi yang namanya kesenjangan digital, maka di saat yang bersamaan masyarakat telah beradaptasi dengan ekosistem ruang digital. Berbagai teknologi mutakhir terus bermunculan seiring perkembangannya. Namun, di samping menggunakan dan memanfaatkan berbagai ruang digital, masyarakat juga harus cerdas dalam memilih dan memilah, memproduksi maupun menyebarkan sebuah informasi.

Data pribadi setiap warga negara juga harus dilindungi guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak aktivitas di ruang digital lainnya yang akan memberikan dampak negatif dan tidak produktif. Jika tidak dicegah, Indonesia akan jauh tertinggal dengan negara-negara maju dan berkembang lainnya.


Oleh karena itu, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), setiap *platform* digital atau perusahaan yang bergerak di sektor TIK diwajibkan untuk melakukan pendaftaran PSE. Permenkominfo 5/2020 ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Para Pembaca Majalah Kominfo Next yang berbahagia, edisi kali ini akan kami ulas mengenai kewajiban pendaftaran PSE, sebagaimana yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga ruang digital dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek negatif. Semoga melalui Kominfo Next, masyarakat dapat semakin paham terkait maksud dan tujuan pemerintah meregulasi tata kelola ruang digital yang aman dan produktif.

Selamat membaca!



**Ketika
Indonesia
tidak ada lagi
yang namanya
kesenjangan
digital, maka
di saat yang
bersamaan
masyarakat
telah
beradaptasi
dengan
ekosistem
ruang digital.**



DEWG G20

Konektivitas dan Pemulihan Pasca Covid-19

Halo Sobatkom! Tahu kan di tahun 2022 ini Indonesia menjadi Presidensi G20? Forum internasional G20 menjadi bagian penting dunia karena merepresentasikan lebih dari 2/3 penduduk dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia.

Penasaran kan apa aja sih peran Kementerian Kominfo dalam kegiatan tersebut?

Dalam penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia ini, Kementerian Kominfo dipercaya untuk memegang tugas sebagai penanggung jawab bidang komunikasi dan media, sekaligus sebagai pengampu Digital Economy Working Group (DEWG).

DEWG berawal dari pembentukan Digital Economy Task Force (DETF) G20 tahun 2017 pada masa Presidensi Jerman, yang bertujuan untuk membahas Inisiatif Pengembangan dan Kerja Sama Ekonomi Digital pada masa Kepresidenan Tiangkok tahun 2016. DETF bekerja melalui diskusi dan konsultasi dengan engagement group (EG) G20 dan pemangku kepentingan lain.

Lalu, saat Presidensi G20 di Italia tahun 2021, DETF bertransformasi menjadi Digital Economy Working Group (DEWG). Elevasi *task force* menjadi *working group* ini digagas oleh Indonesia, sehingga DEWG menjadi *working group* di bidang digital yang pertama kalinya dilaksanakan di KTT G20 tahun ini. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, peningkatan status membuka peluang bagi Indonesia menjadi pemimpin pembahasan kebijakan ekonomi digital global.

DEWG memiliki lingkup tugas membahas pemanfaatan teknologi digital melalui tukar-menukar informasi dan pandangan, serta mencari pemahaman bersama tentang kebijakan yang mendorong ekonomi digital yang tangguh dan berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, dengan lingkungan digital yang aman, terlindungi, dan terhubung, sekaligus memitigasi tantangan dan risiko digitalisasi .

Dalam DEWG tahun ini, Indonesia punya tiga isu prioritas yang akan dibawa dalam sidang DEWG. Pertama, soal konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19. Lalu yang kedua, tentang literasi digital dan keterampilan digital. Nah isu prioritas ketiga tentang arus data lintas negara dan arus data dengan kepercayaan.

¹ Otlet, Paul (1934). *Traité de Documentation: Le Livre sur le Livre. Théorie et Pratique*. Bruxelles: Editions Mundaneum.

² "Bibliometrics and Citation Analysis: Home". *Research Guides*. University of Wisconsin-Madison Libraries. Dikunjungi 7 Juli 2020.



Mari kita bahas satu persatu. Pertama tentang konektivitas dan pemulihan pasca Covid-19. Mengapa isu konektivitas dan pemulihan ini masuk ke isu prioritas?

Dua tahun pandemi ini *bikin* semua tatanan dunia berubah, semua aktivitas berubah secara digital dan kita pun menjadi sangat bergantung dengan teknologi. Tapi sisi baiknya, pandemi membuat kita “dipaksa” untuk terbiasa dengan transformasi digital.

Supaya semua aktivitas digital kita lancar, pemerintah harus terus menggenjot pemerataan pembangunan infrastruktur digital. Karena *nggak* semuanya punya akses yang sama ke internet. Ada SobatKom yang tinggalnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau daerah (3T) sana, yang kalo mau akses aplikasi belajar pun susah karena sinyalnya kurang atau bahkan masih *blank spot*.

Nah, karenanya isu konektivitas digital ini jadi salah satu isu utama yang dibahas dalam pertemuan negara-negara anggota G20 tahun ini. Tujuannya, untuk memastikan ekosistem ekonomi digital di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik.

Bicara soal konektivitas digital, *nggak* bisa cuma diskusi tentang konektivitas jaringan fisik aja nih Sobatkom, tapi juga interkonektivitas sosial masyarakat di ranah digital. Istilahnya, *people-centered digital connectivity*. Pemanfaatan konektivitas digital yang berpusat pada masyarakat, menempatkan masyarakat sebagai fokus utama pengembangan konektivitas digital. Gimana biar konektivitas digital ini bisa membantu kita menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, sekaligus memberdayakan.

Selain *people-centered digital connectivity*, ada empat subtopik yang dibahas di pertemuan DEWG tentang konektivitas digital ini. Ada tentang keamanan digital sebagai kunci pendukung keberlanjutan bisnis yang ngebahas berbagai risiko serangan siber yang mengancam kita di internet, lalu ada bahasan tentang G20 Digital Innovation Network yang memfasilitasi kerja sama pelaku inovasi digital di seluruh dunia.

Subtopik lainnya, tentang Digital Transformation Expo, pameran yang akan menampilkan capaian-capaian negara anggota G20 berkaitan dengan perihal kebijakan, strategi, dan inovasi transformasi digital.

Subtopik terakhir yang dibahas di DEWG adalah ITU’s Smart Village and Smart Island Initiative, gagasan terkait desa pintar dan pulau pintar, yang dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah perdesaan.

Bagaimana, Sobatkom sudah semakin paham kan, tentang pentingnya pembahasan mengenai konektivitas digital terutama saat pandemi ini. Di edisi berikutnya kita akan bahas isu prioritas lainnya. Nantikan ya!



³ Mohammadi, Mehdi (2016). “Parallel Document Identification using Zipf’s Law” (PDF). Proceedings of the Ninth Workshop on Building and Using Comparable Corpora. LREC 2016. Portorož, Slovenia. pp. 21–25. Archived (PDF) from the original on 2018-03-23. (<https://comparable.limsi.fr/bucc2016/pdf/BUCC04.pdf>)

IMF Harapkan Kepemimpinan Indonesia di G20 Dukung Langkah Institusi Hadapi Krisis

Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 untuk mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis.



Dana Moneter Internasional (IMF) menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 untuk mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi IMF yang dipimpin oleh Direktur Pelaksana Kristalina Georgieva pada Minggu, 17 Juli 2022, di Istana Kepresidenan Bogor.

“Ibu Kristalina tadi menyampaikan bahwa IMF akan melakukan langkah untuk bisa membantu negara-negara miskin tersebut yang akan menghadapi kondisi yang luar biasa berat. Nah ini, kepemimpinan Indonesia nanti di bawah Bapak Presiden Jokowi pada saat pertemuan G20 diharapkan bisa pimpinan-pimpinan dari negara G20 akan mendukung langkah dari institusi-institusi yang memiliki kemampuan untuk membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis,” ujar Menteri Keuangan.

Menurut Sri, IMF menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa situasi inflasi yang melanda berbagai negara telah menyebabkan bank-bank sentral mengeluarkan kebijakan menaikkan suku bunga. Maka, kemungkinan berbagai negara miskin yang sekarang sudah dalam kondisi sangat rawan akan berada dalam kondisi yang makin sulit, terkena krisis pangan, dan terkena juga kemungkinan krisis keuangan.

“Seperti sekarang ini terjadi di berbagai negara Afrika dan juga bahkan negara seperti Srilanka, ini akan menjadi sangat penting karena jangan sampai kemudian kemampuan dunia internasional untuk mencegah krisis menjadi makin lemah dan menyebabkan risiko makin tinggi,” imbuhnya.

“Bapak Presiden yang akan menjadi tuan rumah G20 nanti menjadi sangat-sangat penting untuk bisa memobilisasi dukungan semua leaders G20 untuk bisa membantu terutama negara miskin,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan harapannya agar negara-negara African Union bisa diundang di G20 karena selama ini G20 tidak pernah memasukkan negara-negara



tersebut di dalam pembahasannya secara permanen. Karena itu, pada presidensi Indonesia ini, Presiden Jokowi berinisiatif untuk mengundang African Union dan diharapkan bisa menjadi keputusan permanen G20.

“Ini juga menyebabkan kita bisa membahas masalah dunia secara lebih lengkap karena suara dari negara-negara terutama dari Afrika yang sekarang sedang menghadapi banyak sekali kesulitan pangan, kesulitan dari sisi ekonomi, dan juga keuangan menjadi sangat penting,” tandasnya. (BPMI Setpres)

Bertemu CEO Jepang, **Presiden:** Indonesia Salah Satu Tempat Investasi Terbaik

Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa *check and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik.



Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah CEO perusahaan Jepang di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang, pada Rabu, 27 Juli 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Jepang merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia dengan karakter investasi yang berkualitas.

“Saya sangat menghargai kualitas investasi Jepang. Namun, saya juga berharap investor Jepang mempertimbangkan *competitiveness*-nya. Sehingga dapat bersaing dengan investor lain di Indonesia,” ujar Presiden.

“*In short*, kualitas baik, harga bersaing, itulah yang kita harapkan dan saya yakin Indonesia masih merupakan salah satu tempat investasi terbaik,” lanjutnya.

Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, Presiden Jokowi mengatakan bahwa *check and balances* dalam sistem pemerintahan Indonesia berjalan dengan baik. Politik domestik Indonesia juga sudah sangat stabil, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga cukup baik pascapandemi.

“Tahun yang lalu kita tumbuh 3,69 (persen) dan kuartal pertama tahun ini Indonesia ekonominya masih tumbuh 5,01 persen *year on year*, inflasi juga

bisa dijaga di 4,35 (persen). Kemudian defisit fiskal juga cukup baik, saya kira tahun ini akan jatuh di bawah 4,” jelasnya.

Selain itu, Indonesia juga masih memiliki cadangan devisa sebesar USD135 miliar, dan bisa untuk 6-7 bulan impor. Saat ini, investasi diharapkan bisa untuk membangun ekonomi hijau termasuk di bidang transisi energi.

“Saat ini juga kita sedang memulai membangun ibu kota baru di mana banyak sekali peluang investasi, mulai dari infrastruktur, teknologi untuk membangun *smart city*, dan lain-lainnya. Kebijakan investasi juga sudah kita sederhanakan lewat omnibus law, Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga semua perizinan bisa ditangani secara terkoordinasi di kantor investasi,” paparnya.

Kepada para CEO, Presiden pun meminta agar mereka bisa menghubungi Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jika mengalami kendala dalam berinvestasi di Indonesia.

“Para CEO silakan minta nomor HP-nya Menteri Investasi, ini penting. Jika ada masalah bisa langsung berhubungan dengan Menteri Investasi. Jika tidak bisa selesai di Menteri Investasi, silakan hubungi saya,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para CEO yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid.

Adapun para CEO yang hadir yaitu CEO Toyota Motor Corp Akio Toyoda, CEO Sojitz Corp Masayoshi Fujimoto, CEO Mitsubishi Corp Katsuya Nakanishi, CEO Mitsubishi Motors Corp Takao Kato, CEO Mitsubishi Chemical Corp Jean-Marc Gilson, CEO Denso Corp Koji Arima, CEO Toyota Tsusho Ichiro Kashitani, Vice President Sharp Corp Masahiro Okitsu, Vice President Inpex Corp Kenji Kawano, dan Vice President Kansai Electric Power Matsumura Mikio. (BPMI Setpres)



Indonesia-Korea Selatan Sepakat Tingkatkan Kemitraan Strategis

Presiden Jokowi juga mendorong implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement untuk mendorong pemenuhan berbagai target tersebut.



Presiden Joko Widodo meyakini hubungan kerja sama antara Indonesia-Korea Selatan akan makin kokoh terutama kemitraan di bidang ekonomi. Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan pernyataan pers bersama Presiden Yoon Suk-yeol usai melakukan pertemuan bilateral, di Kantor Kepresidenan Yongsan, Seoul, 28 Juli 2022.

“Kita sambut baik tren perdagangan bilateral yang terus meningkat, kita sepakat untuk terus membuka akses pasar, mengatasi hambatan-hambatan perdagangan, dan mempromosikan produk-produk unggulan kedua negara,” ucap Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi juga mendorong implementasi konkret dari Indonesia-Korea Economic Partnership Agreement untuk mendorong pemenuhan berbagai target tersebut.

Di bidang investasi, Presiden Jokowi menyampaikan investasi Korea Selatan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan pesat dan prospek yang baik khususnya di beberapa bidang termasuk industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik industri kabel listrik dan telekomunikasi, serta garmen dan energi terbarukan.

“Dalam pertemuan dengan Presiden Yoon, secara khusus saya mendorong kerja sama investasi dari Korea terutama di bidang percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik di Indonesia termasuk proyek industri baterai terintegrasi dengan pertambangan dan industri baja otomotif untuk kendaraan listrik,” kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyambut baik investasi Korea Selatan dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara antara lain kerja sama di bidang pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, dan *capacity building* di bidang pembangunan *smart city*.

“Saya menyambut baik penandatanganan MoU antara Kementerian Investasi dengan POSCO Korea dan Krakatau Steel Indonesia terkait investasi di bidang industri baja otomotif untuk kendaraan listrik dan partisipasi dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara dengan nilai keseluruhan investasi mencapai USD6,37 Miliar dan akan menyerap lebih dari 58 ribu tenaga kerja” tutur Presiden Jokowi.



Di akhir pernyataannya, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan Korea Selatan bagi Presidensi Indonesia di G20 dan menantikan kehadiran Presiden Yoon untuk hadir di Bali bulan November mendatang.

Sementara itu Presiden Yoon Suk-yeol dalam keterangannya menyampaikan, Korea berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia sesuai dengan perkembangan dunia yang dinamis.

“Saya merasa kita punya banyak kesamaan, dan tahun depan kita menyambut 50 tahun hubungan Korea-Indonesia, saya berharap kerja sama dapat setahap lebih maju, dan saya berharap untuk lebih banyak bertemu dan berkomunikasi dengan bapak Presiden Joko Widodo,” ungkap Presiden Yoon. (BPMI Setpres)

Inovasi Minyak Makan Merah sebagai Alternatif Pencegahan Stunting

Kepala PPKS Edwin, keunggulan dari minyak makan merah tersebut terletak pada nilai gizi dan kandungan pro-vitamin A dan E yang lebih tinggi dari minyak goreng pada umumnya.

Kepala PPKS Edwin, keunggulan dari minyak makan merah tersebut terletak pada nilai gizi dan kandungan pro-vitamin A dan E yang lebih tinggi dari minyak goreng pada umumnya.



Presiden Joko Widodo meninjau proses penelitian minyak makan merah di Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Kampung Baru, Kota Medan, pada Kamis, 7 Juli 2022. Minyak makan merah sendiri merupakan inovasi minyak sawit yang berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional dalam membantu pencegahan *stunting* atau kekerdilan dari masyarakat.

“Minyak makan merah ini tidak hanya bisa berfungsi untuk menggoreng, tapi bisa juga untuk suplemen untuk membantu masyarakat kita dari *stunting* karena nilai gizi dari minyak makan merah ini sangat besar dibanding dengan minyak goreng yang beredar di pasaran,” ujar Kepala PPKS, Edwin Lubis dalam keterangannya.

Menurut Edwin, keunggulan dari minyak makan merah tersebut terletak pada nilai gizi dan kandungan pro-vitamin A dan E yang lebih tinggi dari minyak goreng pada umumnya. Dalam pengolahannya, Edwin menyebut, PPKS menggunakan teknologi sederhana dengan mempertahankan nutrisi di dalamnya.

“Keunggulan dari minyak makan merah ini adalah gizi atau kandungan vitamin A dan vitamin E lebih tinggi karena kita mengutamakan nutrisi dalam pengolahannya,” lanjutnya.

Edwin menjelaskan bahwa produksi minyak makan merah ini dapat dikembangkan oleh koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena nilai investasi yang lebih kecil dibandingkan pabrik minyak goreng komersial. Selain itu, Edwin menyebut biaya logistik dari produksi minyak makan merah ini juga kecil.

“Ini diharapkan dibangun di sentra atau di daerah-daerah perdesaan sehingga pasti akan lebih murah karena biaya logistiknya bisa dikatakan tidak ada,” tambahnya.

Di akhir keterangannya, Edwin menuturkan bahwa edukasi dan sosialisasi tentang manfaat minyak makan merah perlu dilakukan kepada masyarakat karena adanya perbedaan warna dengan minyak goreng pada umumnya. Ia pun juga meminta dukungan semua pihak untuk membantu menyosialisasikan produk inovasi yang dapat menjadi salah satu solusi dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia.

“Tentunya harapan kami dukungan seluruh *stakeholder* untuk menyosialisasikan minyak makan merah ini,” tandasnya.

Hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi. (BPMI Setpres)



Minyak makan merah ini tidak hanya bisa berfungsi untuk menggoreng, tapi bisa juga untuk suplemen untuk membantu masyarakat kita dari *stunting*



Kontribusi UMKM bagi Perekonomian Besar, Presiden Tekankan Pentingnya Izin bagi UMKM

Presiden pun akan kembali memastikan bahwa proses pengajuan NIB sudah lebih cepat dibandingkan sebelumnya.



Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memiliki izin berusaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Presiden mengingatkan bahwa UMKM memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja di Tanah Air.

Demikian disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara Pemberian NIB Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan Tahun 2022 di Gedung Olahraga Nanggala Kopassus, Jakarta, Rabu, 13 Juli 2022.

“Kita memiliki 65,4 juta UMKM, sekali lagi 65,4 juta UMKM ini data per 2021 dan kontribusi terhadap perekonomian kita, PDB kita, besar sekali 61 persen, besar sekali. Oleh sebab itu pemerintah kalau enggak mengurus UMKM, keliru, salah besar. Karena kontribusi terhadap ekonomi nasional 61 persen dan penyerapan tenaga kerja 97 persen itu di UMKM, bukan yang gede-gede, ini perlu dicatat,” ucap Presiden.

Kepala Negara menginstruksikan pemerintah daerah untuk mendorong pengusaha UMKM segera mendapatkan NIB. Presiden pun akan kembali memastikan bahwa proses pengajuan NIB sudah lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

“Yang namanya izin ini penting sekali, saya sudah cek saat itu waktu OSS (Online Single Submission) jadi, apakah benar yang namanya NIB ini cepat, Nomor Induk Berusaha ini cepat kalau kita ingin mengajukan. Saat itu saya melihat cepat tapi nanti mau saya cek lagi apakah sampai saat ini masih cepat kalau kita minta nomor induk berusaha,” ucap Kepala Negara.

“Sekarang sudah sampai angka 7 ribu sampai 8 ribu per hari, tapi yang saya minta bukan angka 7 ribu 8 ribu per hari. Yang saya minta 100 ribu per hari izin harus keluar,” tambah Presiden.

Selanjutnya, Presiden menyebut bahwa NIB dapat bermanfaat bagi para pelaku UMKM salah satunya dalam mendapatkan bantuan usaha mikro dari pemerintah dan memanfaatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Ajak mereka semuanya pegang NIB, biar kalau mau ambil kredit di bank mudah. Kalau nanti ada bantuan untuk usaha-usaha mikro dari pemerintah juga mudah, kita buka sudah semuanya ketemu. Karena semuanya pegang NIB. Kalau enggak ada



ini kita mencari ke lapangan juga akan sangat sulit pemerintah kalau ingin membantu,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Presiden mendorong para pelaku UMKM untuk segera meningkatkan kualitas produk yang dijual, mulai dari kemasan, desain, dan material yang digunakan agar dapat segera masuk ke pasar ekspor. Presiden mengaku senang karena saat ini banyak terdapat produk UMKM yang menuju pada kualitas yang lebih baik.

“Ini semuanya harus diteruskan agar level kita meningkat ke level yang lebih tinggi dan akhirnya nanti produk-produk seperti itu akan mudah sekali untuk masuk ke pasar ekspor. Hati-hati, sekarang batas antarnegara itu sudah tidak ada, ekspor ke semua negara sangat mudah sekali,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid. (BPMI Setpres)



Komitmen Terapkan Regulasi dan Perkuat Kedaulatan Digital

Sejarah masa lalu Indonesia dalam memperjuangkan, merebut, hingga mempertahankan kemerdekaan bukanlah waktu yang singkat dan perjuangan yang mudah. Dalam menghadapi penjajah, para pejuang yang kokoh nan berani terus menyuarakan kedaulatan wilayah-wilayah nusantara untuk menyatu menjadi sebuah bangsa dan negara yang besar.

Buah dari perjuangan itu dalam catatan sejarah kita sebut sebagai fase pertama kedaulatan, yakni dekolonisasi. Fase pertama ini merupakan perjuangan kemerdekaan politik dan teritorial, masa perjuangan pahlawan dalam merebut kemerdekaan, termasuk upaya menyebarkan berita kemerdekaan guna mendapat pengakuan kedaulatan di mata dunia.

Tapi tantangan Indonesia tidak berhenti di saat *the founding fathers* dan para pahlawan berhasil memproklamasikan kemerdekaan.

Sejarah baru dimulai ketika Indonesia memperjuangkan jati dirinya di hadapan dunia sebagai negara kepulauan yang dikenal melalui Deklarasi Djuanda. Dari fase inilah, gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote disatukan dalam semangat kebhinekaan untuk membangun kawasan kebangsaan di laut.



Jutaan kilometer perairan wilayah kita menjadi bagian dari negara kesatuan kita bukan melalui perjuangan tanpa senjata, tetapi perjuangan diplomasi



“Jutaan kilometer perairan wilayah kita menjadi bagian dari negara kesatuan kita bukan melalui perjuangan tanpa senjata, tetapi perjuangan diplomasi,” jelas Menkominfo Johnny G. Plate.

Saat ini, Indonesia telah memasuki fase ketiga kedaulatan digital. Adalah kedaulatan digital. Sebagai negara besar dengan penduduk terbanyak keempat dunia, posisi Indonesia bagi negara-negara maju dan berkembang tidak dipandang sebelah mata.

Potensi market dalam aktivitas di ruang digital menjadi salah satu instrumen bahwa dunia akan terus melirik Indonesia. Dampak positifnya pasti sangat terasa, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pemanfaatan yang jauh dari tujuan pemerintah dalam melindungi masyarakat.

“Sehingga kita perlu mempersiapkannya secara benar dan melalui negosiasi dan pembicaraan antarlintas kepentingan, baik dalam negeri dan internasional antarbangsa, baik di antara penyelenggara negara maupun pelaku usaha di dunia,” ujarnya.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menerapkan berbagai kebijakan yang sangat memperhatikan aktivitas masyarakat Indonesia. Tentu regulasi-regulasi yang ada saat ini mendorong pemanfaatan ekosistem teknologi digital sebagai salah satu sumber penghasilan yang bernilai tinggi.

Berkaitan dengan aktivitas di ruang digital, Indonesia memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menjadi payung hukum dalam mengatur secara umum penggunaan platform digital.



Secara khusus yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi warga negara hingga konten-konten negatif seperti perjudian, pornografi dan lain sebagainya, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan dalam Permenkominfo 5/2020 menjelaskan mengenai hak masyarakat, seperti perlindungan terhadap data pribadi. Sehingga dalam peraturan tersebut mewajibkan setiap PSE yang beroperasi di Indonesia baik PSE asing maupun domestik untuk mendaftarkan diri sebagai perusahaan berbasis digital yang legal.

Kementerian Kominfo telah memberikan kebijakan kewajiban pendaftaran PSE sejak 2020, yakni setelah Permenkominfo 5/2020 itu diterbitkan. Mengingat kesempatan yang diberikan cukup memakan waktu, pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah tegas dan disiplin, yaitu mendorong setiap PSE untuk melakukan pendaftaran. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi bangsa digital, namun hal itu harus didorong dengan aktivitas masyarakat di ruang digital yang perlu dilindungi.

“Karena PSE lingkup privat sudah diberikan kesempatan yang panjang untuk mendaftar dan pendaftarannya pun sangat sederhana, tidak berkaitan dengan konten, tetapi pendaftaran saja,” jelasnya.

Pendaftaran PSE

Lindungi Kepentingan Bangsa

Kebijakan penerapan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dilakukan guna melindungi kepentingan masyarakat dan bangsa. Pendaftaran PSE bukanlah sebuah perizinan, dan dapat dilakukan secara sederhana serta tidak terkait dengan data pribadi pengguna. Kewajiban ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang PSE.

Dalam peraturan tersebut diamanatkan bahwa segenap dan setiap PSE yang beroperasi di dalam negeri, baik lokal maupun global, perlu melakukan pendaftaran. Rentang waktu untuk mendaftar cukup panjang, yakni lebih dari 1 tahun sejak aturan PM 5 Tahun 2020 berlaku.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Johnny G. Plate, menegaskan bahwa pendaftaran PSE tidak terkait dengan data pribadi pelanggan PSE, melainkan data-data dasar, serta alamat dan contact person dari penyelenggara sistem elektronik. Pendaftaran PSE utamanya dilakukan dalam rangka penegakan aturan untuk perlindungan kepentingan nasional, bangsa, serta kepentingan masyarakat Indonesia.

“Apabila di kemudian hari terjadi masalah, pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerja sama bersama-sama dengan PSE,” jelasnya.

Adapun prasyarat pendaftaran bagi PSE ditujukan untuk memungkinkan pemerintah melakukan perlindungan terhadap hak-hak warga negara apabila terjadi masalah di PSE tersebut. Contohnya terkait perlindungan data pribadi masyarakat, negara berkewajiban melakukan uji layak sistem untuk menghindari potensi-potensi masalah secara teknis, administrasi, dan hukum, dalam rangka menjaga kepentingan masyarakat Indonesia.





"Hal ini dilakukan untuk menjaga reputasi dan kedaulatan digital Indonesia," terang Menteri Johnny.

Selama masa pendaftaran, Kementerian Kominfo juga melakukan koordinasi agar pendaftaran melalui Online Single Submission (OSS) tidak menemui kendala. Selain itu Kementerian Kominfo juga terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai institusi dan instrumen lembaga negara di dalam negeri dan lembaga-lembaga atau negara-negara sahabat secara global.

Tidak kalah penting, Kementerian Kominfo turut berkomitmen dalam mendukung industri kreatif nasional dan inovasi di ruang digital. Dengan berkembangnya ruang digital di Indonesia



Apabila di kemudian hari terjadi masalah, pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerja sama bersama-sama dengan PSE



diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

"Kami mengetahui betul dan memberikan dukungan terhadap pengembangan industri kreatif dan inovasi nasional, khususnya para milenial di ruang digital. Kami berharap ruang digital kita menjadi ruang digital yang sehat dan bermanfaat, utamanya bagi warga negara Indonesia," terang Menkominfo.

Menkominfo turut mengajak masyarakat, para pengamat, Non-Governmental Organization (NGO), dan media-media untuk mendorong agar PSE yang beroperasi di Indonesia melaksanakan kewajiban dan mengikuti aturan yang berlaku. "Saya mengingatkan setiap PSE untuk memperhatikan aturan hukum di negara yang bersangkutan. Kami tetap akan membantu PSE baik nasional maupun global, agar dapat melaksanakan pendaftarannya.

Menkominfo juga menegaskan menjadi tugas pemerintah untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan usahanya secara baik di Indonesia, serta melindungi kepentingan segenap warga negara Indonesia. (hm.ys)

Enam Kategori PSE Lingkup Privat yang Perlu Mendaftar

Menjaga ruang internet agar aman dan sehat merupakan tanggung jawab para pemangku kepentingan di sektor TIK, tak terkecuali bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta setiap PSE mengikuti regulasi di Indonesia.

Pendaftaran PSE dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) yang telah disiapkan. Melalui OSS, penyelenggara PSE lingkup privat dengan mudah melakukan proses pendaftaran yang juga disiapkan panduan.

Terdapat enam kategori jenis layanan PSE Lingkup Privat yang perlu didaftarkan berdasarkan PP PSTE. Pertama, PSE yang melakukan kegiatan atau menawarkan jasa jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, Gojek dan Tokopedia.

Kedua, PSE yang menyediakan pengelolaan dan pengoperasian layanan transaksi keuangan, misalnya Paypal, Gojek dengan Gopay-nya, dan Traveloka dengan Traveloka Pay Later.

Ketiga, mereka yang melakukan kegiatan dana usaha di ruang digital dengan memberikan layanan berbayar seperti Netflix, Genflix, dan Spotify. Gim juga termasuk dalam kategori ini, karena ada transaksi yang dilakukan (membeli pernak-pernik gim), sehingga ada unsur pengiriman atau muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui program aplikasi lain ke luar perangkat pengguna.

Keempat, menyediakan dan mengoperasikan layanan komunikasi, tapi tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan yang

berbentuk platform digital, layanan jejaring serta media sosial. Sebagai contoh, WhatsApp dan Telegram.

Kemudian kategori yang kelima yaitu jenis layanan mesin pencari, semisal Google, BING, dan Yahoo. Adapula layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan, atau kombinasi dari sebagian atau seluruhnya.

Kategori PSE terakhir yang wajib mendaftar adalah siapapun yang mengoleksi maupun memproses data pribadi orang Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan.

"Mungkin ada pihak yang tidak termasuk dalam kelima kategori sebelumnya, namun ia barangkali termasuk yang mengumpulkan. Contohnya LinkedIn, Glints, dan Jobstreet. Mereka termasuk yang mengumpulkan data pribadi. Jadi, ini adalah hal-hal yang tidak ada bisnisnya tetapi mereka melakukan kegiatan pemrosesan data pribadi orang Indonesia," pungkas Dirjen Semuel.

Jenis Layanan PSE Lingkup Privat Berdasarkan PP 71/2019

01

Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa

02

Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan

03

Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna

04

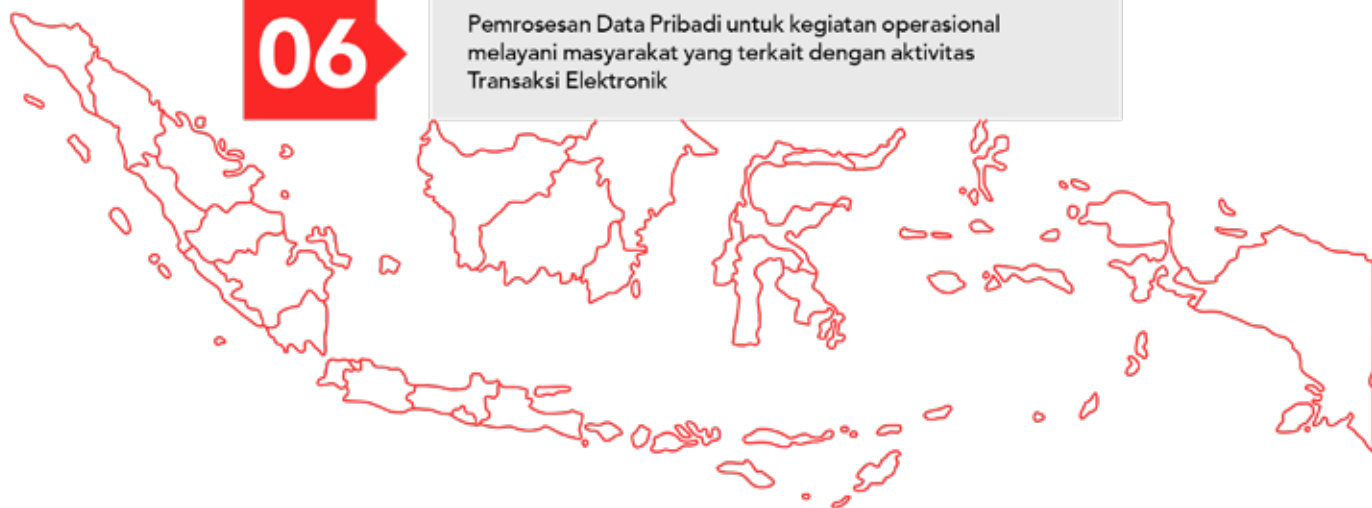
Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring, dan media sosial

05

Layanan mesin pencari, layanan penyediaan Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya

06

Pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas Transaksi Elektronik





Dirjen Aptika turut menegaskan bahwa pemberlakuan pendaftaran bagi PSE bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang kondusif, aman, dan nyaman, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Sesuai PP PSTE, setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di ruang digital wajib terdaftar, selain juga mengurus perizinan apabila diperlukan atau ditentukan oleh perundang-undangan. Sebagai contoh penyelenggara sistem pembayaran keuangan perlu mendapatkan izin dari Bank Indonesia. Begitu juga lembaga keuangan, harus mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dirjen Aptika menyatakan, Kementerian Kominfo sudah melakukan sosialisasi dan memberi waktu bagi PSE yang belum terdaftar untuk mengurus pendaftarannya. Peraturan terkait pendaftaran sistem elektronik ini telah dirumuskan sejak tahun 2019, dan berlaku di 2020. Pemerintah justru memperpanjang masa pendaftaran bagi PSE yang sudah beroperasi.

“Tahun 2019 kita merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2012 menjadi PP No. 71/2019. Setelah selesai, kita bikin turunannya Peraturan Menkominfo No. 5/2020. Seharusnya, ini tahun lalu sudah selesai tetapi kita perpanjang enam bulan lagi. Makanya ditetapkan deadline pendaftaran bagi PSE yang belum mendaftar, yaitu tanggal 20 Juli 2022 lalu,” tandas Semuel.

Tahun 2019 kita merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 82/2012 menjadi PP No. 71/2019. Setelah selesai, kita bikin turunannya Peraturan Menkominfo No. 5/2020



Siapkan Pendampingan

Kementerian Kominfo terus berupaya agar proses pendaftaran dapat dilakukan secara mudah dan tidak menyulitkan bagi para PSE yang beroperasi di Indonesia, baik asing maupun dalam negeri. Pemerintah selalu berkorespondensi dan membuka peluang bagi siapapun yang ingin menjadi bagian dari ekosistem digital Indonesia.

Selain itu PSE juga diberi peluang untuk mendaftar secara manual, serta disediakan layanan pendampingan apabila para PSE mengalami kesulitan saat mendaftar.

Proses verifikasi data dari PSE yang telah mendaftar pun dilakukan secara ketat, untuk memastikan data yang didaftarkan adalah data yang sah dan benar. "Dengan pendaftaran ini, kita percaya PSE akan memberi data yang sebenar-benarnya. Setelah itu kita audit. Kalau terbukti tidak lengkap, kita mintakan (kelengkapannya) dan diberi tenggat waktu. Kalau tidak dilengkapi, kita akan lakukan pemblokiran," jelas Dirjen Samuel.

la menambahkan, proses audit dan verifikasi juga dilakukan untuk mencegah adanya data ganda pada PSE yang mendaftar. "Auditnya sangat ketat, agar tidak ada lagi data ganda. Kalau terjadi, pasti data sah yang akan kita pakai."

Dirjen Aptika kembali menekankan, aturan ini merupakan bentuk upaya negara melakukan tugasnya dalam melindungi bangsa Indonesia dari risiko ancaman ruang digital yang terus meningkat. Tujuan negara dalam melakukan tugasnya, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ruang digital pun perlu dijaga sama seperti halnya menjaga ruang fisik. Agar pertumbuhan ekonomi digital kita bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia.

Pantau dan Amankan Aktivitas Digital, Kominfo Telah Blokir Ratusan Ribu Situs Judi Online

Dalam rangka menjaga aktivitas ruang digital yang produktif dan menghindari penyalahgunaan yang tidak bermanfaat, dibutuhkan dukungan dari seluruh kalangan masyarakat. Pemerintah terus berupaya secara bertahap mengurangi hingga memutus konten-konten negatif sampai ke akar-akarnya, sudah pasti melalui berbagai cara.

Berbagai macam capaian dari usaha-usaha itu terus membuahkan hasil. Namun demikian, ibarat patah satu tumbuh seribu. Selalu saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan sengaja memanfaatkan potensi pasar di Indonesia untuk kegiatan non produktif, sebut saja aktivitas judi online.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan setiap harinya, situs judi online terus bermunculan, tapi di saat yang bersamaan pemutusan akses terhadap konten-konten tersebut juga terus dilakukan.

"We stop it, tapi dia muncul terus secara online. Karena kemudahan teknologi digital. Setiap kali melakukan *takedown*, dia mudah sekali untuk meng-*upload* yang baru," ungkap Menkominfo Johnny G. Plate.

Sejak tahun 2018, mesin pengais konten negatif atau AIS yang dikelola oleh tim di Kementerian Kominfo bekerja tanpa batas setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan setiap tahunnya. Berjalan terus tanpa henti.



Khusus konten judi online, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan lebih dari 552 ribu situs judi online telah dilakukan pemutusan akses per akhir Juli 2022.

“Dari tahun 2018 sampai dengan 31 Juli 2022 lebih dari 552 ribu konten judi di ruang digital yang sudah diblokir dan di-takedown. Khusus di tahun 2022 terhitung sejak bulan Januari hingga akhir Juli jumlah rata-rata konten judi online yang dilakukan pemutusan akses sebanyak 12.300 setiap bulannya atau sekitar 410 konten per hari,” jelasnya.

Melihat aktivitas pemblokiran yang dilakukan secara masif, Menteri Johnny meyakini bahwa dukungan terhadap ruang digital yang bersih dan produktif sebenarnya tidak pernah berhenti. Dukungan dari masyarakat pun mengalir deras dengan diterimanya informasi lewat kebijakan aduan konten.

Terlebih lagi, *surveillance system* dan *cyber patrol* yang dilakukan Kementerian Kominfo setiap harinya berjalan efektif. Sehingga berbagai konten-konten negatif termasuk aktivitas judi online dapat diatasi.

“Namun, kita sama-sama ketahui ‘*patah tumbuh hilang berganti*’ persoalan ini. Kita *takedown* 410, yang muncul juga banyak setiap hari,” tegasnya.

Menteri Johnny memastikan *cyber patrol* terus dilakukan 24 jam setiap harinya. Termasuk saat ini, Kementerian Kominfo mempunyai kemampuan untuk membaca domain-domain atau situs-situs yang berbasis alfabet (huruf) dan numerik (angka).

“Sebelumnya hanya huruf saja, sekarang huruf dan angka. Mudah-mudahan kita tetap selalu akan berusaha membersihkan. Sehingga ruang digital kita bisa dimanfaatkan untuk digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.



UMKM Lokal Ramaikan 3rd Meeting DEWG G20 Indonesia

Pertemuan Ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital Presidensi G20 Indonesia atau 3rd Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting Presidensi G20 Indonesia digelar di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT pada 20-22 Juli 2022. Dua pertemuan sebelumnya telah digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Maret 2022 dan juga Yogyakarta pada Mei 2022.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) pun turut meramaikan pertemuan Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia ketiga ini. Para pelaku UMKM terlihat sibuk mempromosikan produknya kepada para delegasi dan tamu undangan yang hadir dalam pertemuan itu. Produk yang mereka hadirkan di antaranya, kain tenun, kopi, *snack* atau cemilan, minuman tradisional (sari kunyit dan jahe), souvenir, dan produk asli NTT lainnya.

Tak hanya itu, tiga perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia (*provider*) jasa layanan telekomunikasi seluler seperti Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata juga ikut memeriahkan pameran tersebut. Termasuk WIR Group yang menampilkan teknologi metaverse yakni melalui aplikasi *virtual reality* dan *augmented reality*.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, menyempatkan diri untuk menyambangi beberapa *booth* UMKM. Beberapa pelaku UMKM yang terlibat merupakan bawaan dari badan usaha milik daerah (BUMD) Perumda Bidadari Kabupaten Manggarai Barat yang berkolaborasi dengan dinas UMKM.

Para pelaku UMKM pun berharap agar pemerintah bisa terus mengajak mereka terlibat, sehingga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (*parekraf*) di Labuan Bajo ikut merasakan, adanya manfaat dari event G20.

Dalam pertemuan ketiga DEWG itu, hadir 20 delegasi negara-negara anggota G20 terdiri atas 17 delegasi hadir fisik dan 3 delegasi menghadiri secara virtual. Hadir pula dua negara undangan serta tiga organisasi internasional.

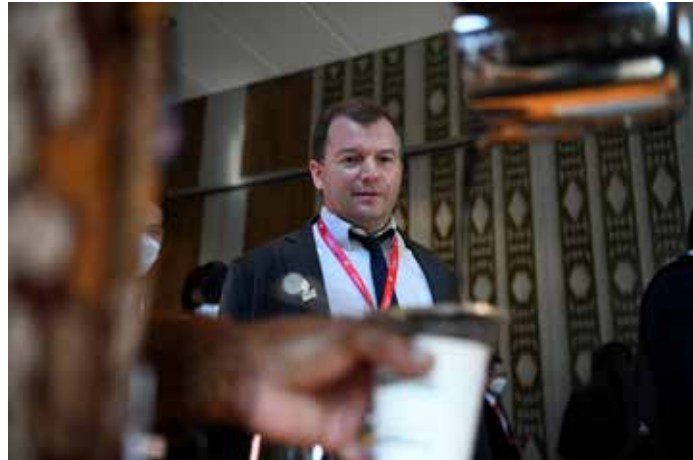


Permainan Interaktif di Booth ITF

Seorang pengunjung bermain game di booth yang ada di area Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20. (Pey)

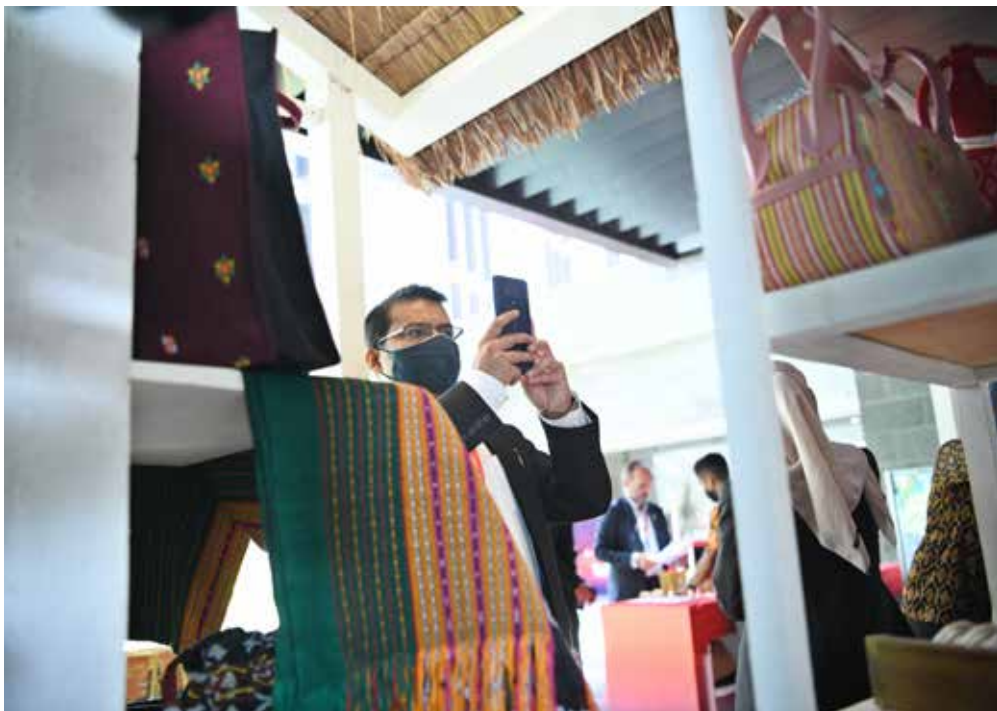
Kopi Tuk

Delegasi mencoba Kopi Tuk yang merupakan kopi khas Pulau Flores. (Pey)





1. Petugas booth menata snack hasil dari UMKM Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipamerkan. (Pey)
2. Delegasi negara Singapura membeli snack hasil UMKM Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dipamerkan. (Pey)



Seorang delegasi negara India memotret Suvenir di *booth area* Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20.



1. Seorang pengunjung memotret Suvenir di *booth area* Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20. (Pey)
2. Seorang pengunjung mencoba Suvenir ikat kepala di *booth area* Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20. (Pey)



Seorang ibu penjaga *stand* melipat tenun Pulau Flores di both area Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20. (Pey)



Delegasi Uni Eropa mencoba tenun Pulau Flores di *booth area* Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20. (Pey)



Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Platte mengunjungi booth UMKM di area Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20. (AYH)



Mengawal Sahabat Frekuensi; Tak Ada Tangga Utama, Tangga Darurat pun Jadi

Hamzah, SH., MH.

Kepala Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo



Menjelang sore hari itu di pelabuhan Gorontalo. Di langit bergantung awan-awan pekat, siap menumpahkan hujan sebentar lagi. Berjejer kapal-kapal niaga, juga kapal penumpang di sepanjang bibir pelabuhan. Ada yang sebentar lagi melepas sauh dan memulai pelayaran mengarungi lautan. Ada juga yang masih punya waktu leluasa, sedang dapat jadwal berlabuh dua hingga tiga hari; memberi kesempatan awak kapal mengisi logistik dan mengunjungi keluarga jika bermukim di kota tempat singgah.

Di luar dari program substansialnya, banyak cerita dari layanan penertiban frekuensi dinas maritim dan amatir kali ini. Dari bertemu kapal tol laut, empat puluh dua warna bendera di atas kapal, memotret realitas ekonomi perikanan, hingga berjibaku ke puncak-puncak gunung. Penertiban nasional terhadap pelanggaran penggunaan sumber daya strategis frekuensi radio adalah agenda reguler yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia oleh tiga puluh lima kantor monitoring bidang spektrum frekuensi yang tersebar dari Sabang – Merauke. Memastikan kepatuhan, membangun kultur tertib penggunaan frekuensi, menjaga kualitas layanan telekomunikasi adalah *goal* utamanya.

Satu kapal tampak bersiap memulai pelayaran. KM Sabuk Nusantara 76. Hujan telah sempurna menyiram lautan, deras saat itu. Dari banyak kapal yang bersandar, KM 76 ini belum sempat diinspeksi. Baru saja menyelesaikan satu kapal yang terakhir, KM Osaka yang juga akan segera berangkat. Begitu tim menjejak daratan, tangga penumpang KM 76 telah ditarik. Awalnya sudah maklum, layanan pemeriksaan terhadap kapal ini tak masalah di kesempatan berikutnya saja, sebab tentu tak mudah meniti tangga darurat, menembus lebat hujan pula.

Kami sudah bersiap balik kanan ketika tim mitra dari KSOP Kementerian Perhubungan memanggil via *handy talky*, "Tim LG (Loka Gorontalo, red.) ditunggu kapten di ruang kemudi jika ingin melakukan pemeriksaan".

Ok, go, kami memutuskan menaiki kapal segera, tak ingin menyita waktu terlalu lama atas kapal yang akan segera berangkat. Sedikit terhenyak ketika hendak menaiki kapal dan yang tersisa tinggal tangga darurat untuk beberapa kru terbatas. Jadilah kami memanjat sambil berpegangan kuat pada tali di sisi kanan.

Demikianlah perjuangan menunaikan tugas, tak ada tangga utama, tangga *emergency* pun tak apa.

Sabuk Nusantara

Pernah mendengar istilah tol laut? Jika di benak Anda yang terlintas adalah membangun jalan tol di atas lautan, maka Anda tak perlu merasa bersalah karena banyak yang mengira demikian. Namun jika benar begitu tentu biayanya akan sangat fantastis.



Di luar dari program substansialnya, banyak cerita dari layanan penertiban frekuensi dinas maritim dan amatir kali ini, dari bertemu kapal tol laut, empat puluh dua warna bendera di atas kapal, memotret realitas ekonomi perikanan, hingga berjibaku ke puncak-puncak gunung.

Bayangkan menghubungkan laut Jawa ke Sulawesi misalnya, takkan terhitung banyaknya material dan kesulitan yang dihadapi untuk membangun konstruksi tiang pancang di dasar-dasar lautan.

Tidak efisien pastinya, kecuali kalau dibantu pasukan Sugriwa dan Subali yang sangat melegenda membangun jembatan di atas lautan yang memisahkan Ayodya – Alengka dalam cerita klasik Ramayana versus Rahwana.

Entah cerita ini fiksi atau nyata namun faktanya di Indonesia beberapa proyek serupa ternyata bisa diwujudkan. Sudah pernah melintasi jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan pulau Madura bukan? itu benar-benar jalan tol di atas lautan. Panjangnya mencapai 5.438 meter.

Meski benar bisa membangun jalan di atas lautan untuk mempermudah mobilitas manusia dan keperluan pengangkutan logistik, tentu akan dipilih yang *feasible* saja. Kapal-kapal Sabuk Nusantara yang disiapkan pemerintah inilah sebetulnya tol lautnya, armada bersubsidi dan berbiaya murah yang menjamin konektivitas pulau-pulau di Indonesia melalui jalur laut.



Memotret Realitas Terdalam Aktivitas Ekonomi Perikanan

Hari ketiga penertiban dinas maritim, tim merapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang Gorontalo Utara. Aktivitas bongkar muat hasil tangkapan sedang riuh-riuhnya. Aroma ikan menguar kuat. Kualitas tangkapan di Gorontalo tergolong yang istimewa, kualitas ekspor. Jika pun di pasar lokal, itu dipastikan akan menjadi suguhan istimewa di restoran-restoran top seantero negeri. Ekonomi perikanan ini menjadi sektor penopang strategis selain sektor pertanian di bumi Serambi Madinah.

Riuh rendah suara pengepul, awak kapal yang menurunkan peti-peti ikan, pengendara mobil box yang membawa balok-balok es, juga hilir mudik pengunjung, pembeli individu menjadi suguhan menarik denyut ekonomi perikanan. Bahwa lautan, daratan, bebukitan semua memiliki dan menyimpan potensinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Kolaborasi Lintas Warna

Biru, hijau, coklat, putih, hingga oranye. Tentu saja ini bukan deskripsi warna pelangi. Penertiban frekuensi dinas maritim dan amatir memang selalu paling ramai. Mitra, *stakeholder* yang mendukung banyak, lintas kementerian/lembaga; dari kepolisian (Reskrim dan Poloairud), TNI dari Denpom dan Angkatan Laut, Dinas KKP, KSOP Kemhub hingga ORARI. Pasti sudah bisa menebak warna-warna di awal, warna *uniform* masing-masing. Demikianlah, warna boleh beda, namun warna yang selalu kita jaga, kita junjung tetap sama; Merah Putih.



... lautan, daratan, bebukitan semua memiliki dan menyimpan potensinya sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

42 Warna Bendera

Saat sedang di ruang kemudi KM Sabuk Nusantara 59, sambil memeriksa dokumen ISR (Izin Stasiun Radio) kapal, perhatian tiba-tiba tertuju pada 42 kotak bendera dengan kode *alphabetic* dan numerik yang menarik. Ternyata bendera-bendera isyarat. Dari isyarat sedang memerlukan bantuan kepanduan, permintaan bantuan medis, mengubah haluan, maupun penanda sedang labuh jangkar. Ilmu baru, meski tahu kalau pasti bendera isyarat, namun tak tahu peruntukannya untuk apa saja, baru dapat kesempatan mengeksplorasi, langsung di atas kapal.

A ALPHA		Jika di bawah kapal atau pada jangkar, maka panggilan kapal mayat	N NUMERIK		menyatakan tidak
B BRAVO		Kapal sedang mengalami kesulitan, membutuhkan dan membutuhkan	O OSCAR		ada orang jatuh kelaut
C CHARLIE		menyatakan adanya bahaya	P PAPA		perubahan: semua orang segera ke kapal, kapal segera berangkat
D DELTA		Kapal mayat sedang mengalami kecelakaan	Q QUEEN		Kapal dalam keadaan bahaya
E ECHO		Kapal sedang mendapat bantuan ke laut	R ROMEO		Kapal tidak berangkat atau dalam keadaan bahaya
F FOXTROT		Kapal sedang mengalami kecelakaan	S SIERRA		Kapal sedang berangkat kembali
G GOLF		Permintaan bantuan darurat	T TANGO		jadilah kapal kembali
H HOTEL		Walaupun kapal sedang mengalami kecelakaan	U ULTRA		Kapal sedang berangkat ke daerah berbahaya
I INDIA		Kapal sedang mendapat bantuan ke laut	V VICTOR		Kapal sedang mengalami kesulitan
J JULY		Kapal sedang mengalami kecelakaan	W WHISKEY		Perubahan: semua orang segera ke kapal
K KILO		Kapal sedang mengalami kecelakaan	X XRAY		Perubahan: semua orang segera ke kapal
L LIMA		Kapal sedang mengalami kecelakaan	Y YANKEE		Kapal sedang berangkat kembali
M MIKE		Kapal sedang mengalami kecelakaan	Z ZULU		Kapal sedang berangkat kembali

Hingga ke Puncak-Puncak Gunung

Layanan penertiban yang pasti memerlukan 'adventure' ke gunung-gunung paling banyak di *fixed service*, frekuensi *microwave link* operator

seluler (opsel). Ini karena *tower-tower* operator rata-rata berlokasi di puncak gunung ataupun bukit. Medan ekstrim, beberapa tak bisa dilalui kendaraan roda empat, bahkan ada yang hingga harus berjalan kaki. Adapun untuk dinas maritim dan amatir, medannya lebih banyak di laut dan di daratan landai. Meski demikian, terdapat spot di pegunungan kali ini di daerah Bone Bolango untuk dinas amatir, sebuah kawasan pertambangan. Sama seperti ke *tower opsel*, medannya juga menantang.



Budaya Total Action, Total Solution

Penertiban adalah layanan untuk memastikan frekuensi bersih, komunikasi lancar bebas interferensi. Jika anda anak muda yang familiar dengan lagu *Until I Found You* dari Stephen Sanchez, lagu yang *hype* banget jadi *backsound* di *platform* Instastory, bukan itu tujuannya. Berbeda, bukan tentang misi menemukan pelanggar tetapi tentang mengawal pengguna bisa *comply* dengan regulasi; memiliki izin, sesuai peruntukan, sesuai parameter teknis dan perangkat telekomunikasinya tersertifikasi atau terstandarisasi. Membantuinya dengan semangat khas #TeamLG dan tim SDPPI, *Total Action Total Solution*.



Pemerintah Terus Antisipasi Subvarian Covid-19

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa subvarian BA.4 dan BA.5 memang memiliki kemampuan untuk menembus atau menghindari vaksinasi (*vaccination evasion*).



Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 18 Juli 2022. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Pandemi Covid-19 masih berlangsung dan bahkan sejumlah negara mengalami peningkatan kasus harian, termasuk Indonesia. Untuk itu, pemerintah terus mengawasi dan mengantisipasi penyebaran subvarian Covid-19, baik BA.4 maupun BA.5, meskipun situasi pandemi di Indonesia masih berada di level 1 standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Demikian disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan persnya selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 18 Juli 2022.

"Pemerintah terus mengantisipasi penyebaran subvarian baik BA.4 maupun BA.5. Tingkat transmisi komunitas mencapai angka 85 orang per 100.000. Jadi sesuai dengan level WHO kita masih di level 1 karena standarnya 20 per 100.000. Dari tingkat reproduksi efektif relatif landai, dalam 3 minggu terakhir dari 1,27 turun 1,26 dan 1,24 dan masih semua pulau di atas 1. Untuk di luar Jawa-Bali, Sumatra di 1,29. NTT, Kalimantan, Sulawesi di 1,18, Maluku di 1,08," ujar Airlangga.

Airlangga melanjutkan, penambahan kasus tertinggi saat ini masih terjadi di Jawa-Bali yang merepresentasikan hampir 95 persen kasus. Sementara itu, untuk daerah-daerah di luar Jawa-Bali relatif masih rendah dan landai.

“Yang aktif masih di Sumatra Utara, Kalsel, Kaltim, Sumsel, Sulsel, dan Kalteng. Kemudian di luar Jawa-Bali transmisi komunitas yang mulai naik itu ada di Palangkaraya di Kalimantan Tengah, dan yang lain dari 385 kabupaten/kota masih di level 1, baik dari BOR maupun isolasi itu juga masih dalam tingkat memadai,” imbuhnya.

Terkait capaian vaksinasi, Airlangga menjelaskan bahwa daerah yang masih berada di bawah 70 persen untuk dosis pertama yaitu Papua Barat dan Papua. Sementara itu, untuk capaian dosis kedua, 10 provinsi masih di bawah 70 persen, dan untuk dosis ketiga 28 provinsi masih di bawah 28 persen.

“Dari hasil evaluasi seluruhnya di luar Jawa-Bali PPKM-nya masih level 1 seperti yang telah kita putuskan sampai akhir bulan ini dan yang di level 2 hanya di Sorong, Papua Barat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan bahwa subvarian BA.4 dan BA.5 memang memiliki kemampuan untuk menembus atau menghindari



vaksinasi (*vaccination evasion*). Subvarian tersebut diyakini bisa menembus vaksinasi dua hingga tiga kali lipat lebih efektif dibandingkan varian Omicron BA.1, sehingga kemungkinan masyarakat untuk terinfeksi lebih tinggi walaupun yang bersangkutan sudah divaksinasi.

“Tetapi juga kita sampaikan ke Bapak Presiden bahwa proteksi untuk masuk rumah sakit, hospitalisasi, dan *fatality* masih tetap tinggi sehingga disarankan masyarakat tetap cepat-cepat saja di-*booster* karena walaupun ada kemungkinan terkena tapi *booster* itu terbukti mampu melindungi kita untuk tidak masuk rumah sakit. Kalau masuk rumah sakit tingkat fatalitasnya akan sangat rendah,” jelasnya.

“Kami juga meng-*update* ke Bapak Presiden ada varian baru yang namanya BA.2.75 yang sekarang sudah beredar di India mulainya dan sudah masuk ke 15 negara. Ini juga sudah masuk di Indonesia, satu ada di Bali karena kedatangan luar negeri, dua ada di Jakarta yang kemungkinan besar transmisi lokal, sedang kita cari sumbernya dari mana,” tandas Budi.





Dorong Percepatan Vaksinasi Penguat bagi Masyarakat dan Jemaah Haji

Presiden Joko Widodo turut mendorong jajarannya agar mempercepat pemberian vaksinasi Covid-19 penguat atau *booster* bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mewajibkan vaksinasi penguat sebagai syarat dalam sejumlah kegiatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan persnya selepas rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 18 Juli 2022.

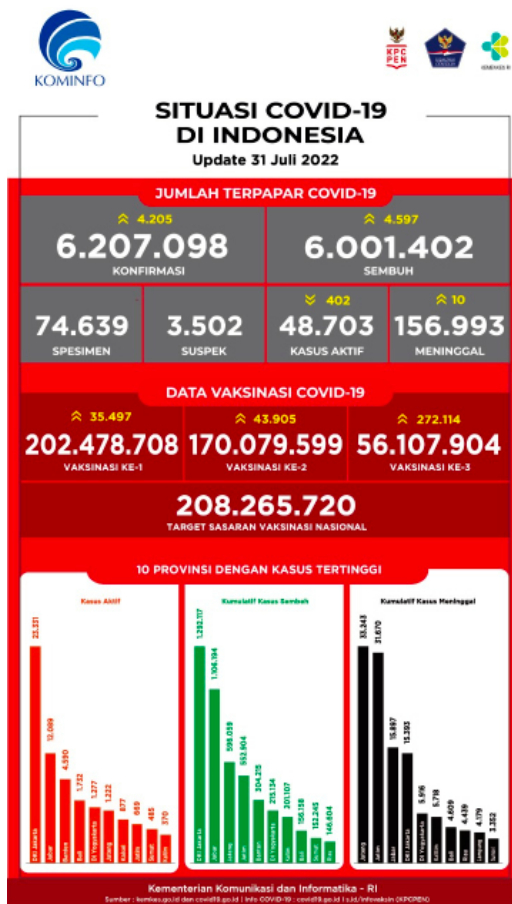
“Bapak Presiden memberikan arahan agar vaksinasi *booster* itu dipercepat. Beberapa kegiatan masyarakat nanti akan kita minta agar diwajibkan vaksinasi *booster* dengan tujuan untuk melindungi masyarakat, kalau terkena jangan sampai masuk rumah sakit, dan jangan sampai wafat,” ujar Budi.

Selain bagi masyarakat umum, Presiden Jokowi juga mengarahkan agar vaksinasi penguat diberikan kepada para jemaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi. Presiden meminta agar para jemaah divaksinasi saat berada di asrama haji sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.

“Bapak Presiden memberikan arahan untuk semua jemaah haji yang pulang dan belum di-booster diminta sambil menunggu di asrama haji sebelum dijemput oleh keluarganya bisa di-booster,” ungkapnya.

Menurut Menkes Budi, vaksinasi penguat telah terbukti efektif dalam memberikan proteksi ekstra bagi masyarakat dari kemungkinan dirawat di rumah sakit maupun meninggal. Menkes menjelaskan bahwa secara persentase, mereka yang meninggal dunia akibat Covid-19 merupakan orang-orang yang belum divaksin atau baru divaksin satu kali.

“Sedangkan yang sudah divaksin dua kali jauh menurun persentase fatalitasnya atau yang wafat kalau terkena dan yang di-booster sudah sangat menurun persentase yang wafatnya atau kalau kena,” tandasnya.





Perkuat Bahasan Deklarasi Menteri, Pemerintah Libatkan Multipihak

Pemerintah Indonesia bersama delegasi negara anggota G20 telah membahas tata kelola data lintas batas negara. Melalui pertemuan ketiga Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau 3rd Digital Economy Working Group (DEWG) Meeting, Pemerintah Republik Indonesia berupaya memperkuat pembahasan menuju Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri-menteri Ekonomi Digital G20 yang akan berlangsung bulan September mendatang.

“Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau DEWG menyelesaikan pembahasan terkait dengan arus data lintas negara. Kami membahas konsep yang namanya Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF),” ujar Alternate Chair DEWG G20 Dedy Permadi kepada jurnalis usai 3rd DEWG Meeting hari kedua yang berlangsung secara hibrida di Labuan Bajo, Nusa

Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022),

Menurut Dedy Permadi, dalam Ministerial Declaration akan disepakati dan dideklarasikan poin-poin yang berkaitan dengan isu-isu utama yang sudah dibahas dalam beberapa bulan terakhir ini. Oleh karena itu, untuk memperkuat pembahasan, Pemerintah Indonesia mendiskusikan secara mendalam isu tersebut tidak hanya antarpemerintah tapi juga dengan *multi-stakeholders*.

“Tetapi kami mengundang juga sektor privat, organisasi internasional, juga akademisi dan juga *non-government organization* atau organisasi-organisasi non-pemerintah lainnya. Jadi ini adalah *multi-stakeholders* dialog atau dialog multipihak,”

tuturnya.

Melalui dialog multipihak, Pemerintah Indonesia ingin mendengarkan perspektif dan pandangan dari pihak-pihak yang terkait. Hal itu sangat penting karena tata kelola data diperlukan untuk penguatan perlindungan data pribadi konsumen atau pengguna penyelenggara sistem elektronik yang selama ini sudah menggunakan platform global.

“Di dalam platform global juga memuat pengelola dan juga mendistribusikan data-data. Arus data lintas batas negara ini akan menjadi semakin penting ke depan, menjadi satu isu yang makin penting untuk dibicarakan dan juga tata kelolanya

dinegosiasikan antara negara-negara di dunia,” tandasnya.

Alternate Chair DEWG G20 Dedy Permadi menanyakan beberapa negara anggota G20 telah mengatur adanya aspek resiprositas di dalam tata kelola data lintas batas negara. Menurutnya, posisi Indonesia mendorong tata kelola data global terutama diantara negara-negara G20.

“Bahwa kita secara regulasi nasional juga terus memperkuat regulasi kita terkait dengan tata kelola dan penguatan regulasi tata kelola data yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia, di antaranya adalah memperkuat regulasi eksisting, salah satunya sedang berusaha untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai salah satu bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat tata kelola data di level nasional,” jelasnya.



Menteri Kominfo Jajaki Teknologi Qualcomm untuk New Smart Metropolis IKN

San Diego, 27 Juli 2022 – Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, bertandang ke kantor Qualcomm di San Diego, California, Amerika Serikat, pada Rabu (27/07) waktu setempat atau Kamis (28/7/2022) WIB.

Menkominfo dalam kunjungan tersebut menjajaki penerapan teknologi Qualcomm untuk *smart new capital city* di Ibu Kota Negara baru khususnya maupun Indonesia umumnya.

Menteri Johnny diterima Senior Vice President Government Affairs Global Qualcomm, Nate Tibbits. Selain mendengar paparan tentang teknologi yang dikembangkan Qualcomm, Menkominfo juga menyaksikan demonstrasi penerapan teknologi Qualcomm tersebut.

“Presiden sudah memberikan arahan agar kita membangun Ibu Kota Negara baru yang mengusung konsep kota modern, kota cerdas atau *smart city* dan ramah lingkungan,” papar Menteri Johnny se usai pertemuan.



Presiden Jokowi menekankan nantinya IKN baru bukan sekadar kota yang berisi kantor-kantor pemerintahan, melainkan kota baru dengan konsep *new smart* metropolis. Presiden berharap *new smart* metropolis mampu menjadi magnet, menjadi global talent magnet, menjadi pusat inovasi. Dengan begitu IKN akan menjadi kota baru yang kompetitif di tingkat global.

Qualcomm mengembangkan dua teknologi, yakni *fixed wireless access* (FWA) dan *frequency millimeter wave* yang dapat diterapkan, baik di daerah padat penduduk maupun terpencil (*remote*). *Frequency millimeter wave* merupakan frekuensi tertinggi untuk teknologi 5G dan Qualcomm menawarkan frekuensi sebesar 26GHz, 28GHz, dan 60GHz.



Qualcomm telah menerapkan teknologi 5G di Moto GP Mandalika bekerjasama dengan Telkom. Terbuka kemungkinan perusahaan itu bekerja sama kembali dengan perusahaan telekomunikasi Indonesia untuk menerapkan 5G pada Presidensi G20 Indonesia di Bali, November 2022. Teknologi Qualcomm berupa *smart education* pernah diterapkan di Indonesia semasa pandemi Covid-19.



Menteri Johnny mengatakan tantangan terbesar penerapan teknologi *fixed wireless access* dan *millimeter wave* ialah infrastruktur. "Fokus pemerintah saat ini ialah menyelesaikan pembangunan 4G sebagai tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi Indonesia dan pada saat bersamaan memperkenalkan teknologi 5G kepada masyarakat," kata Menkominfo.

Adopsi teknologi untuk kota cerdas jelas membutuhkan investasi besar, dukungan regulasi yang sesuai perkembangan teknologi, serta mengusung standar tingkat komponen dalam Negeri (TKDN).

Pemerintah melalui Kemenkominfo akan menggunakan skema *blended financing*, yakni pembiayaan investasinya bersumber dari pemerintah dan sektor swasta perusahaan-perusahaan telekomunikasi dan aplikasi. Meski harus berinvestasi besar, *Return on Investment* (ROI) pembiayaan pembangunan proyek 5G ini jauh lebih cepat dibandingkan teknologi lain.

"Secara rata-rata, *return of investment*-nya 4,8 tahun," kata Menkominfo.

Pengembangan teknologi digital sesungguhnya mendorong perkembangan ekonomi digital hingga miliaran dollar. Menkominfo mencontohkan teknologi digital akan menciptakan lapangan kerja.

"Sampai tahun 2030 diprediksi tidak kurang dari 4,4 juta lapangan kerja bisa dihasilkan dari adopsi teknologi digital," pungkas Menteri Johnny. (*)



Indonesia Dorong Negara G20 Perkuat Kesepahaman Tata Kelola Data

Penggunaan ruang digital yang makin intensif, saat ini membuat data mengalir lintas batas. Bahkan, penggunaan arus lalu lintas data global di tahun 2020 ke 2026 diprediksi naik sampai tiga kali lipat.

Chair Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia, Mira Tayyiba menyatakan, Pemerintah Indonesia mendorong negara anggota G20 saling memperkuat tata kelola data.

“Skalanya sampai dengan 780 Exabytes. Exabyte itu sama dengan 10^{18} (sepuluh pangkat delapan belas). Ini memang sangat besar, jadi data itu sendiri pun sangat dibutuhkan dalam public policy making. Data pada platform e-commerce mungkin saja melintas batas negara. Jadi tujuan kita di G20 adalah memperkuat tata kelola data,” jelasnya saat memberikan keterangan kepada media di sela Pertemuan Ketiga DEWG G20 hari kedua, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022).

Chair DEWG G20 mengakui adanya perbedaan latar belakang atau mazhab dalam tata kelola data di setiap negara. Ada yang sifatnya lebih *corporate driven*, *individual driven*, bahkan ada juga yang menekankan *state driven*.

“Jadi pada saat kita bicara tata kelola baik, tata kelola yang mana yang cocok? Isu Cross-Border Data Flow (CBDF) dan Data Free-Flow with Trust (DFFT) menjadi yang paling seru, karena tidak mungkin lagi dengan kita makin intensif menggunakan ruang digital, tidak membicarakan data, itu tidak mungkin.

Oleh karena itu, Chair DEWG menyatakan Pemerintah Republik Indonesia berupaya membangun *common understanding* agar negara anggota G20 bisa saling belajar dan memahami satu sama lain. “Sehingga kita akan mencari suatu prinsip ataupun *communalities* yang menjadi landasan bagi CBDF dan DFFT yang sering disebut *transparency*, kemudian *fairness*, *lawfulness* dan *through some extend* terutama untuk data pribadi adalah *reciprocity*,” tandasnya.

Menurut Chair DEWG Mira Tayyiba pembahasan isu CBDF dan bertujuan untuk menunjukkan data berperan penting dalam memanfaatkan peluang

ekonomi digital. Selain itu, ada penekanan akan data secara umum dan pengaturan khusus dengan data pribadi.

“Oleh karena itu, prinsipnya tidak bisa disapu empat prinsip sekaligus, namun kita sekarang menyebutnya 3 plus 1 begitu. Tiga yang pertama yaitu *lawfulness*, *fairness*, *transparency*, itu adalah untuk yang *data in general*. Sementara yang data pribadi itu, kita harus ada pertimbangan untuk *reciprocity*, tetapi semua masih berproses karena kita masih dalam tahap pembahasan, belum *conclude*,” jelasnya.

Dalam pertemuan ketiga, delegasi negara anggota G20 mendiskusikan masalah tata kelola data dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai definisi umum yang jelas tentang kepercayaan dan prinsip-prinsip umum pada kegiatan aliran data lintas batas. Hasil kesepakatan itu akan diterapkan pada tingkat praktis.

“Inisiatif tersebut juga mempertimbangkan poin-poin kunci dari kesamaan pemetaan dalam pendekatan regulasi untuk Cross-Border Data Transfers yang dikembangkan oleh Presidensi Italia sebelumnya,” ujarnya.



Menkominfo Optimistis Operasi Komersial Satelit HBS Sesuai Jadwal

Los Angeles, 25 Juli 2022 – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengadakan pertemuan dengan Boeing, Space X, dan Hughes Network System (HNS) di Los Angeles, Amerika Serikat, Senin (25/7) waktu setempat atau Selasa (26/7) waktu Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung berurutan itu, Menkominfo hendak memastikan operasi komersial Hot Backup Satellite (HBS) yang pembuatan dan peluncurannya melibatkan ketiga perusahaan berlangsung sesuai dengan jadwal.

Menkominfo dalam pertemuan itu didampingi Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kemenkominfo Anang Latif, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo Ismail, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman

Adiwoso. PSN adalah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BAKTI Kemenkominfo dalam pengadaan satelit.

Setelah pertemuan, Menteri Johnny menyatakan optimismenya jadwal peluncuran dan operasi komersial HBS berlangsung tepat waktu. Menkominfo juga optimistis pandemi COVID-19 dan situasi geopolitik tidak menghalangi proses transformasi digital Indonesia melalui pengadaan satelit.

Satelit HBS sebagai bentuk kerja sama antara Kemenkominfo dan pihak swasta ini berkapasitas 160 *giga bits per second*. Sebesar 80 *giga bits per second* akan dipakai pemerintah, 70 *giga bits per second* untuk swasta nasional dan 10 *gigabits per second* untuk negara-negara ASEAN. Satelit ini didukung 18 stasiun bumi di 14 lokasi (*gateway*). *Gateway* utama ada di Cikarang, Jawa Barat.





Menteri Johnny bertemu dengan President of Boeing Commercial Satellite International System Ryan Reid dan sejumlah eksekutif Boeing di kantor Boeing di El Segundo, Los Angeles. Menkominfo dan rombongan berkesempatan melihat kemajuan pembuatan HBS di pabrik Boeing. "Boeing mengonfirmasi satelit diluncurkan awal Mei 2023 dan *commercial operation* September 2023," ungkap Menteri Johnny.

Di SpaceX, Menkominfo bertemu dengan Vice President, Mission Management, Jessica Jensen, dan Vice President, Commercial Sales, Tom Ochineri di markas SpaceX di Hawthorne, California. Menkominfo berkesempatan meninjau pabrik pembuatan roket SpaceX. "SpaceX mengonfirmasi kesiapan peluncur Falcon 9 untuk mengorbitkan HBS sesuai jadwal, yakni awal Mei 2022 di Cape Canaveral, Florida," kata Menkominfo Johnny Plate.

Dalam pertemuan dengan Executive Vice President and General Manager, International Division HNS Ramesh Ramaswamy, di Los Angeles, Menkominfo hendak memastikan HNS menyiapkan perangkat *ground station*. "HNS menyiapkan dan akan menginstalasi 20 ribu terminal bagi layanan publik untuk sekolah, puskesmas, kantor desa, pos perbatasan TNI dan pos polisi mulai 2022.

Pengerjaannya secara simultan agar sesuai dengan peluncuran dan operasi satelit," ujar Menteri Johnny.

President of Boeing Commercial Satellite International System Ryan Reid mengatakan perusahaannya menyediakan teknologi satelit termutakhir yang fleksibel dalam penyediaan data berkecepatan tinggi. "Teknologi ini memungkinkan satelit Boeing mencakup geografi dan populasi Indonesia," katanya.

Diakui pandemi Covid-19 dan situasi geopolitik mempengaruhi proses produksi dan peluncuran HBS dengan roket Falcon 9. Untuk mengangkut satelit dan roket ke dari California ke Florida, misalnya tidak bisa menggunakan pesawat Antonov akibat perang Rusia-Ukraina. Namun Menkominfo optimistis kendala-kendala tersebut bisa diatasi sehingga infrastruktur informasi dan komunikasi bisa melayani masyarakat dan mengurangi kesenjangan digital.

"Satelit akan dibawa melalui jalan darat yang membutuhkan waktu 9 sampai 10 hari. Roket peluncur tidak masalah karena tersedia di Florida. HNS juga sudah memitigasi dengan mengamankan 20 ribu *ground segment* sebagai terminal layanan sinyal wifi-satelit," ucap Menkominfo.



Majukan Kolaborasi, Indonesia Fasilitasi DEWG Bahas Pemanfaatan Data

Presidensi G20 Indonesia sebagai forum internasional utama yang mengusung isu ekonomi secara konsisten mengajukan berbagai inisiatif untuk mengoptimalkan pemanfaatan data.

Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economy Working Group (DEWG) telah membahas kerangka Data Free-Flow with Trust (DFFT) dan Cross-Border Data Flow (CBDF) yang telah diciptakan selama Presidensi G20 Jepang 2019.

Chair DEWG G20, Mira Tayyiba menjelaskan Pemerintah Republik Indonesia memfasilitasi diskusi pemangku kepentingan untuk memajukan upaya kolaboratif pemanfaatan data untuk kepentingan semua.

“Dengan pertumbuhan internet yang semakin meningkat, setiap dari kita di sini memiliki kepentingan penting dalam tata kelolanya, terutama dalam penerapan tata kelola arus data,” ungkapnya dalam Lokakarya Identifikasi Langkah-Langkah Penyeimbangan Kepentingan bagi Multistakeholders pada Arus Data Lintas Batas, yang berlangsung secara hibrida dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (22/07/2022).

Sebagai bagian dari isu prioritas Kelompok Kerja Ekonomi Digital, Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo Mira Tayyiba mengharapkan lokakarya itu dapat mendorong semua pemangku kepentingan dan perwakilan anggota G20 untuk melanjutkan pembahasan secara intensif.

“Untuk dapat memajukan diskusi dalam mewujudkan pemahaman yang inklusif dan seimbang tentang DFFT dan CBDF. Diskusi berlangsung selama perjalanan Gugus Tugas Ekonomi Digital (Digital Economy Task Force) dari presidensi sebelumnya yang diangkat menjadi Kelompok Kerja Ekonomi Digital (Digital Economy Working Group),” jelasnya.

Chair DEWG G20, Mira Tayyiba menyatakan pembahasan mengenai tata kelola data memiliki arti penting. Apalagi dengan adanya peningkatan risiko dan kekhawatiran arus bebas data dari aspek teknis, praktis, dan konseptual. Menurutnya, anggota G20 memiliki keinginan yang sama untuk memajukan diskusi tentang data yang diusulkan Indonesia.

“Dalam rangka mengatasi berbagai isu bergulir tentang pemanfaatan data di masyarakat kita. Isu-isu tersebut menjadi relevan seiring dengan interaksi kondisi dunia yang semakin bergantung pada langkah-langkah berbasis digital seperti dalam mendukung pemulihan pasca-Covid-19 dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.

Lokakarya yang digelar dalam rangkaian Pertemuan Ketiga DEWG G20 itu merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi pembahasan mengenai tata kelola dan aliran data lintas negara.

“Lokakarya ini juga memainkan peran penting dalam pengembangan Ministerial Declaration Draft kita atau Bali Package,” tandas Mira Tayyiba.

Chair DEWG Mira Tayyiba mengatakan, lokakarya ini diadakan dengan tujuan untuk mendorong anggota G20 menuju pemahaman yang lebih seimbang mengenai operasionalisasi DFFT dan CBDF.

“Saya yakin hal ini dapat dicapai dengan memfasilitasi pertimbangan tentang nilai-nilai dan pendekatan yang mendasari pemerintah,

masyarakat sipil dan pelaku industri melalui identifikasi kesamaan, komplementaritas, dan elemen konvergensi di seluruh instrumen nasional, regional dan multilateral untuk mendorong interoperabilitas di masa depan,” ungkapnya.

Chair DEWG yang juga Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo mendorong semua pemangku kepentingan yang hadir secara fisik dan virtual untuk berpartisipasi aktif dalam pertukaran pandangan dan pemahaman yang akan datang.

“Saya sangat berharap *workshop* yang hari ini kita laksanakan dapat menjadi momen untuk saling belajar bagaimana melangkah maju dengan tata kelola data DFFT dan CBDF. Semoga kita semua memiliki diskusi yang bermanfaat,” ujarnya.

Dalam acara itu hadir Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, Samuel A. Pangerapan; Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Doddy Setiadi; Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Komunikasi dan Media Massa, Widodo Muktiyo.

Selain anggota delegasi G20, lokakarya juga diikuti National Knowledge Partners antara lain Universitas Padjadjaran, Universitas Indonesia, dan Universitas Gadjah Mada; serta Global Knowledge Partners: the International Telecommunication Union (ITU), United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).



Menkominfo Tinjau Kemajuan Pembuatan Satelit di Boeing dan SpaceX

Los Angeles, 25 Juli 2022 – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Tujuan kunjungan kerja ini ialah memastikan kemajuan pembuatan satelit di Boeing, SpaceX, dan Hughes Network System.

Boeing perusahaan manufaktur satelit untuk proyek Hot Backup Satellite (HBS). SpaceX perusahaan penyedia roket peluncur (*rocket launcher*) untuk HBS tersebut. Sedangkan Hughes Network System perusahaan yang menyediakan solusi *broadband* bagi satelit dengan teknologi High Throughput Satellite (HTS) yang digunakan HBS.

Dalam kunjungan ini, Menkominfo didampingi Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemenkominfo Anang Latif, Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat

Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail, dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Usman Kansong.

BAKTI Kemenkominfo Maret lalu telah menandatangani kontrak proyek HBS dengan pemenang lelang Konsorsium Nusantara Jaya. Konsorsium Nusantara Jaya merupakan gabungan dari beberapa perusahaan, yaitu PT Satelit Nusantara Lima, PT DSST Mas Gemilang, PT Pasifik Satelit Nusantara, dan PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera.

Direktur Utama BAKTI Anang Latif menjelaskan ada beberapa alasan pentingnya pengembangan proyek HBS ini. "HBS dipilih dalam rangka menyediakan dukungan cadangan untuk memitigasi segala risiko yang mungkin terjadi





pada satelit SATRIA-1. Selain memiliki fungsi utama sebagai cadangan bagi SATRIA-1, penyediaan HBS bertujuan untuk menambah kecepatan internet dan meningkatkan *user experience*," jelasnya.

Proyek pembuatan HBS berlangsung sejak 19 Oktober 2021 ketika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BAKTI melaksanakan pengadaan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur Utama BAKTI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Penyediaan Hot Backup Satellite untuk Transformasi Digital.

Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail menerangkan teknologi satelit ini merupakan pilihan paling tepat untuk mengatasi permasalahan pemerataan akses internet bagi negara yang bentang wilayahnya berkepulauan seperti Indonesia ini. "Dengan satelit, titik-titik terpencil dapat dijangkau dengan relatif mudah dan merata. Teknologi satelit melengkapi berbagai penyediaan infrastruktur akses sinyal dan internet yang telah dibangun Kementerian Kominfo seperti jaringan tulang punggung internet berkecepatan tinggi dan ribuan BTS 4G di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T)," katanya.

Program HBS direncanakan memulai konstruksinya tahun 2022 ini dan akan diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2023. Diharapkan pada kuartal keempat tahun 2023 sudah dapat beroperasi melayani masyarakat.

Selain mengunjungi Boeing, SpaceX dan Hughes Network System, Menkominfo Johnny G. Plate juga bertemu dengan Qualcomm, Cisco, Maxar, dan Meta.



Selamat Tahun Baru Islam

1 Muharram 1444 H

